

Kliping Koran Hasil Workshop

“Pentingnya Pengintegrasian Gender dalam bidang Pendidikan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Banyak yang Enggan Melapor Kasus Trafficking

Rabu, 16 November 2011 - 19:55 WIB

BOGOR (Pos Kota) – Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB Dr. Ir. Titik Sumarti, MS menjelaskan kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan gejala tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*) membuat jumlahnya di Provinsi Jawa Barat masih tinggi.

Itu terbukti, berdasarkan catatan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak tahun ini mencapai 139 korban *trafficking*. “Itu yang dilaporkan dan dijemput Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Provinsi Jawa Barat. Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan,” jelasnya.

Selain kurangnya kesadaran, juga karena kemiskinan, pengangguran dan rendahnya indeks pembangunan gender. “Untuk memberantas perdagangan manusia, diperlukan komitmen bersama, khususnya para pengambil kebijakan dalam menangani semakin maraknya perdagangan manusia,” jelasnya.

Selain itu pihaknya menyayangkan, masih banyaknya tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk disetiap daerah, membuat data kasus trafficking rendah, padahal fakta di lapangan, kasus trafficking terus meningkat.

“Seperti di Kabupaten Bogor yang melapor ke P2TP2A Kabupaten Bogor pada 2010 hanya 5 kasus, sedangkan 2011 hanya 3 kasus. Ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi soal penanganan kasus perdagangan manusia,” jelasnya.

Pihaknya apresiasi, kepada P2TP2A Cianjur yang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan. “Sehingga di daerahnya, cukup banyak masyarakat yang berani melaporkan tindak kejahatan trafficking. Itu terbukti, pada 2009 tercatat sebanyak 93 kasus, kemudian pada 2010 ada 46 kasus, menurun,” jelasnya.

Ketua Bidang Kerjasama P2TP2A Kabupaten Bogor Ratu Nailamuna mengatakan, korban trafficking di daerahnya terbanyak dari wilayah Ciawi, Nanggung dan Cijeruk. “Kami mengakui, kurangnya sosialisasi sehingga kasus trafficking di Kabupaten Bogor yang terdata cukup rendah,” jelasnya.

Meski demikian pihaknya mengklaim sudah berhasil melakukan pendampingan terhadap para korban trafficking hingga tingkat pengadilan. “Tak hanya itu kami juga sudah mengantisipasi salah satunya dengan cara memberikan keterampilan dan modal, agar

mereka tidak tergiur oleh iming-iming para sindikat perdagangan manusia,” paparnya.
(yopi/b)



Umumnya Populasi Perempuan Tinggi

Tujuh Kota/Kabupaten Masuk Zona Merah Trafficking

Rabu, 16/11/2011 - 17:54

KISMI DWI ASTUTI/"PRLM"

KEPALA Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB, Titik Sumarti (kiri) bersama dengan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)...

BOGOR, (PRLM).- Tujuh kota/kabupaten di Jawa Barat masuk dalam zona satu (merah) trafficking. Artinya di tujuh kota/kabupaten tersebut jumlah korban trafficking tinggi dan potensi munculnya korban baru juga sangat besar.

Hal ini terungkap dalam Workshop "Pentingnya Pengintegrasian Gender dalam Program Pendidikan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang digelar Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Rabu (16/11). Dalam kesempatan ini, pemangku kebijakan dari Kab. Cianjur, Kota dan Kabupaten Bogor hadir dan berbagi pengalaman untuk merumuskan rencana aksi ke depan.

Kepala PKGA, Dr. Ir. Titik Sumarti mengatakan berdasarkan data yang ada di Provinsi Jabar, ketujuh daerah zona satu itu yakni Indramayu, Subang, Cianjur, Karawang, Sukabumi, Cirebon, Kota dan Kab. Bandung. Sementara, tujuh kota/ kab. lainnya yakni Sumedang, Kota/Kab. Bekasi, Garut, Tasikmalaya, Kota dan Kab. Bogor masuk dalam zona dua. "Artinya jumlah korban trafficking relatif sedikit tetapi potensi munculnya korban baru besar karena jumlah penduduk perempuan yang tinggi," kata Titik. (A-155/A-88)***

Kasus Trafficking di Jabar Masih Tinggi

November 17 | Posted by Kang Admin | [Headline](#)Tags: [Bogor](#), [tinggi](#), [trafficking](#)

BOGOR KOTA (bogorOnline) – Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB Dr. Ir. Titik Sumarti, MS menjelaskan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan gejala tindak pidana perdagangan manusia (Trafficking) membuat jumlahnya di Provinsi Jawa Barat masih tinggi.

Itu terbukti, berdasarkan catatan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak pada tahun ini mencapai 139 korban trafficking. “Itupun yang dilaporkan dan dijemput Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Provinsi Jawa Barat. Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan,” jelasnya.

Selain kurangnya kesadaran, juga dikarenakan kemiskinan, pengangguran dan rendahnya indeks pembangunan gender. “Untuk memberantas perdagangan manusia, diperlukan komitmen bersama, khususnya para pengambil kebijakan dalam menangani semakin maraknya perdagangan manusia,” jelasnya.

Selain itu pihaknya menyayangkan, masih banyaknya tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk di setiap daerah, membuat data kasus trafficking rendah. Padahal fakta di lapangan, kasus trafficking terus meningkat.

“Seperti di Kabupaten Bogor yang melapor ke P2TP2A Kabupaten Bogor pada 2010 hanya 5 kasus, sedangkan 2011 hanya 3 kasus. Ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya informasi soal penanganan kasus perdagangan manusia,” jelasnya.

Pihaknya mengapresiasi kepada P2TP2A Cianjur yang aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. “Sehingga di daerahnya, cukup banyak masyarakat yang berani melaporkan tindak kejahatan trafficking. Itu terbukti, pada 2009 tercatat sebanyak 93 kasus, kemudian pada 2010 ada 46 kasus, menurun,” jelasnya.

Ketua Bidang Kerjasama P2TP2A Kabupaten Bogor Ratu Nailamuna mengatakan, korban trafficking di daerahnya terbanyak dari wilayah Ciawi, Nanggung dan Cijeruk. “Kami mengakui, kurangnya sosialisasi sehingga kasus trafficking di Kabupaten Bogor yang terdata cukup rendah,” jelasnya.

Meski demikian pihaknya mengklaim sudah berhasil melakukan pendampingan terhadap para korban trafficking hingga tingkat pengadilan. “Tak hanya itu kami juga sudah mengantisipasinya salah satunya dengan cara memberikan keterampilan dan modal, agar mereka tidak tergiur oleh iming-iming para sindikat perdagangan manusia,” jelasnya. (Mas)